

MODEL PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN LINTAS PEMANGKU KEPENTINGAN DI KOTA TASIKMALAYA

Oleh:
Aries Munandar¹⁾*, Harmiati²⁾

¹⁾Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

*Email Korespondensi: agamarusha2020@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penanganan sampah lintas pemangku kepentingan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan kontribusi model kebijakan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan desain kualitatif – eksploratif, dengan teknik pengumpulan data interviu, observasi non partisipan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanganan sampah yang diterapkan mencakup 2 strategi yang saling terintegrasi, yaitu : Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan, dan Strategi Pengurangan Volume Sampah yang Dibuang ke TPS. Strategi ini didistribusikan menjadi 4 kebijakan yaitu : (a) Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Tasik Resik, (b) Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah, (c) Kebijakan Pengembangan Budi Daya Magot berbasis Rumah Tangga dan Komunitas, dan (d) Kebijakan Pengembangan Bank Sampah Berbasis Masyarakat. Model penanganan sampah ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Tasikmalaya, yaitu (1) kontribusi kesejahteraan sosial pada aspek spiritual - non material yaitu suasana lingkungan yang lebih baik, bersih, sehat dan pengurangan risiko bencana; dan (2) kontribusi kesejahteraan sosial pada aspek material berupa peningkatan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan.

Kata Kunci: *Model Kebijakan, Penanganan Sampah, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Satgas Tasik Resik*

ABSTRACT

This study aims to determine the cross-stakeholder waste handling model implemented by the Tasikmalaya City Government and the contribution of this policy model to improving the social welfare of the Tasikmalaya City community. The research was carried out using a qualitative-explorative design, using interview data collection techniques, non-participant observation, and literature study. The results of the study show that the waste management model applied includes 2 mutually integrated strategies, namely: the Strategy for Increasing Environmental Cleanliness, and the Strategy for Reducing the Volume of Waste Disposed at TPS. This strategy is distributed into 4 policies, namely: (a) Policy for Establishing a Tasik Resik Task Force, (b) Policy for Improving Garbage Transportation Facilities and Infrastructure, (c) Policy for Developing Household and Community-based Maggot Cultivation, and (d) Policy for Community-Based Waste Bank Development. This waste management model contributes to improving the social welfare of the community in Tasikmalaya City, namely (1) the contribution of social welfare for the spiritual aspect, namely a better, cleaner, healthier environment and reduced disaster risk; and (2) contribution to social welfare for a material aspect in the form of increased opportunities to earn additional income.

Keywords: *Policy Model, Waste Management, Corporate Social Responsibility, Tasik Resik Task Force*

A. PENDAHULUAN

Persoalan penanganan sampah merupakan problema umum wilayah perkotaan di seluruh dunia (Kahfi, 2017) disamping persoalan lainnya seperti pengangguran, polusi, ketertiban umum, kejahatan, hingga isu pengurusan anak dan lansia, dan sebagainya. Sampah pada hakekatnya adalah sisa dari proses aktifitas manusia yang berwujud fisik sebagai bagian yang tak terpakai sehingga akan dibuang atau disisihkan. Merujuk pada terminologi yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat berupa sisa makanan dan minuman, bekas pembungkus atau kemasan barang, atau limbah dari proses dan aktivitas industry tertentu baik dalam skala kecil maupun besar. Semakin padat jumlah penduduk atau manusia yang bermukim di suatu daerah dan semakin padat aktivitas sosial ekonomi di tempat itu dan volume sampah yang dihasilkan pun semakin banyak. Sehingga memang menjadi suatu kewajiban apabila volume sampah di wilayah perkotaan akan jauh lebih banyak dari pada sampah di wilayah pedesaan.

Secara statistika, jumlah rata-rata sampah yang dihasilkan oleh masing-masing individu manusia adalah sekitar 0,6 kg per orang per

hari (<https://tekno.tempo.co>, diakses 22 Januari 2023). Sehingga adalah wajar apabila agregat volume sampah yang dihasilkan oleh wilayah perkotaan akan menjadi sangat besar mengingat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan memang jauh lebih tinggi dari kawasan pedesaan. Disamping itu aktivitas masyarakat perkotaan juga memiliki kecenderungan menghasilkan sampah lebih banyak karena penggunaan makanan dan minuman yang berkemasan sekali pakai dan kegiatan industrial yang umumnya melakukan proses pengolahan dari bahan-bahan tertentu menjadi barang lain yang menjadi produknya dengan meninggalkan sisa proses berupa sampah atau limbah. Dari fenomena ini, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya volume sampah di suatu tempat akan berbanding lurus jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dikawasan itu.

Sejauh ini penanganan sampah di kota-kota besar dan telah maju maupun pada kota-kota yang belum maju, pada umumnya masih dilihat sebagai bagian dari pekerjaan sektoral yang menjadi tanggung jawab instansi teknis saja. Sementara masyarakat diperlakukan 'nyaman' untuk menikmati perannya sebagai produsen sampah. Pada sisi lain, secara fisik barang-barang sampah sendiri diperlakukan sebagai objek benda yang kotor dan disingkirkan. Hanya beberapa pihak saja, seperti kalangan pemulung dan

pengusaha supplier materi daur ulang yang melihat sampah sebagai sesuatu yang berharga. Di beberapa daerah, memang sudah berkembang unit-unit usaha yang berusaha melihat sisi ekonomi dari material sampah. Namun penanganannya pun masih bersifat terbatas pada jaringan usaha kelompok dan aksi individual.

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah perkotaan tentunya juga menghadapi persoalan terhadap penanganan sampah. Persoalan tersebut terartikulasikan dengan banyaknya keluhan masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap sampah yang berserangan di pinggiran jalan umum (<https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com>, diakses 22 Januari 2023), banyaknya tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) (<https://fokuspriangan.id/2022/05/11/> dan <https://fokusjabar.id/2022/10/21/>, diakses 19 Januari 2023), keluhan tentang pengangkutan sampah (<https://www.dara.co.id/> dan <https://bedanews.com/>, diakses 25 Januari 2023). Merujuk pada berbagai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan tema persampahan di wilayah Kota Tasikmalaya (Haerani et. al, 2019; Yasmin, 2021; dan Nurla, 2021) maka teridentifikasi bahwa telah banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi pengelolaan sampah di wilayah Kota Tasikmalaya bahkan telah didukung

pula oleh berbagai hasil penelitian. Namun demikian hingga saat ini persolalan penanganan sampah di wilayah Tasikmalaya belum juga dapat teratasidengan baik.

Sejak November 2002, penanganan sampah perkotaan di wilayah Kota Tasikmalaya, mulai mekembangkan model penanganan sampah yang sedikit berbeda. Perbedaan itu sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru, bahkan telah banyak pelaku penanganan sampah yang telah menerapkannya secara parsial. Adapun hal yang unik dan khas dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah Kota Tasikmalaya adalah mengintegrasikan semua kegiatan penanganan sampah tersebut dalam satu model yang terintegrasi. Aksi integrasi penanganan sampah tersebut diwujudkan dengan aksi pembentukan Satgas Tasik Resik, Pemanfaatan Magot, dan Pemilahan Sampah untuk penyediaan bahan baku daur ulang. Apabila di berbagai kawasan perkotaan, aksi ini dilaksanakan secara parsial, namun oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, rangkaian aksi tersebut diintegrasikan kedalam satu manajemen penanganan masalah sampah yang saling berkaitan dan terhubung kedalam sebuah proses manajemen bisnis yang memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di kota tersebut.

Dengan merujuk pada uraian

sebagaimana diatas, maka untuk pelaksanaan tugas wajib beban kerja penelitian individual dosen tahun 2023 ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang Model Penanganan Sampah Perkotaan Lintas Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.

B. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan desain eksploratif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif eksplorasi karena pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian yang akan mendalami objek penelitian untuk kemudian dituangkan dalam bentuk gambaran model tentang hubungan kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam mengelola sampah secara terintegrasi di Kota Tasikmalaya.

Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* kepada representasi masing-masing kelompok pemangku kepentingan yang terkait datau terlibat dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi di Kota Tasikmalaya. Secara umum kelompok pemangku kepentingan tersebut terdiri dari : Walikota Tasikmalaya; Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Perangkat pemerintahan kecamatan dan

kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan sampah; Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah; Perusahaan / Korporasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah; Pimpinan lembaga lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya; dan sebagainya. Dalam rangka menjamin keutuhan hasil dan kesimpulan dari penelitian, maka penggalian informasi kepada para informan akan dilakukan secara simultan hingga mencapai kejenuhan data dan informasi yang mengindikasikan bahwa penelusuran informasi telah komprehensif.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang saling menunjang, yaitu : (1) Interview; (2) Observasi Non Partisipan; dan (3) Telaah Dokumen.

Instrumen Penelitian

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri yang dilengkapi dengan Lembar Pedoman Wawancara tentang ikhwal penelitian. Sedangkan instrumen pelengkap terdiri dari : kamera foto; alat perekam video; alat perekam suara; alat tulis yang diperlukan saat melakukan interview dan observasi.

Teknik Pengolahan, Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Data diolah melalui proses dan prosedur pengolahan data yang

umum digunakan dalam metode penelitian kualitatif; yang dimulai dari pengelompokan data dan informasi yang relevan, yang dilanjutkan dengan menyusunnya kedalam rangkaian logika sebab akibat yang tepat sehingga membentuk alur yang dapat menjelaskan dan mengarah pada jawaban atas pertanyaan penelitian. Triangulasi dan klarifikasi data dilakukan untuk menjamin validitas data dapat terjamin dan terkonfirmasi kebenarannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Latar Belakang Model Penanganan Sampah Lintas Pemangku Kepentingan yang Diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pada periode-periode sebelumnya pimpinan pemerintahan dipimpin oleh Pejabat Walikota Cheka Virgowansyah, SSTP., ME., penanganan sampah hanya dilaksanakan secara konvensional tanpa strategi yang khusus. Sehingga banyak terjadi keluhan dari masyarakat terkait sampah yang menumpuk di tempat-tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Bahkan banyak muncul tempat-tempat tumpukan sampah baru yang sering disebut oleh masyarakat setempat sebagai TPS Ilegal. Situasi kebersihan Kota Tasikmalaya menjadi tidak teratur karena banyaknya tumpukan sampah yang sering tidak diangkut oleh

petugas.

Berdasarkan hasil pendalaman ditemukan delapan *symptom* persoalan sebagai berikut: (1) Banyaknya container sampah yang rusak, (2) Banyaknya truk pengangkut sampah yang rusak, (3) Keadaan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah-Ciangir yang sudah mulai penuh, (4) Keadaan alat berat yang rusak, (5) Volume sampah di lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang *over load*, (6) Banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat / TPS Ilegal), (7) lambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, (8) Volume sampah yang diproduksi masyarakat semakin meningkat seiring penambahan populasi penduduk dan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan kedelapan masalah tersebut, ditemukan bahwa inti (*core problem*) persampahan di Kota Tasikmalaya adalah (1) manajemen penanganan sampah yang tidak optimal, dan (2) banyaknya volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Berkaitan dengan hal tersebut, maka strategi yang digunakan oleh Pejabat Walikota dalam mengatasi masalah ini adalah : (1) Bagaimana membuat volume sampah yang harus diangkut dari TPS ke TPA dapat dikurangi, (2) bagaimana TPS dapat difungsikan secara optimal, (3) bagaimana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA data berjalan dengan optimal

dan lancar, dan (4) bagaimana TPS Ilegal dihilangkan dan masyarakat membuang sampah ke TPS yang sudah ditentukan.

Model Penanganan Sampah Lintas Pemangku Kepentingan yang Diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya

Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan

(a) Satgas Tasik Resik

Strategi ini dilaksanakan dengan membentuk 'Satgas Tasik Resik' (Satuan Tugas Tasik Bersih) yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya beserta personil dari unsur TNI dan Polri setempat. Tanggung jawab Satgas ditentukan berdasarkan pembagian zona, dimana pada zona tanggung jawabnya masing-masing Satgas tersebut bertugas untuk : a) membersihkan sampah-sampah yang berserakan, termasuk di lokasi-lokasi TPS Ilegal, b) menghimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah secara sembarangan seperti di lokasi aliran sungai, spot-spot TPS Ilegal dan sebagainya, c) menangkap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan atau di luar dari tempat yang sudah ditentukan (TPS) untuk diberikan pembinaan d) memantau kebersihan lokasi-lokasi dalam zona lingkungan kerjanya baik secara langsung maupun melalui CCTV.

Menurut Penjabat Walikota, tantangan yang sebenarnya dari strategi ini bukan pada membentuk dan menggerakkan Satgas-nya, melainkan pada penyediaan anggaran operasional agar untuk menggerakkannya. Terdapat tantangan tersendiri karena pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tersusun dan tidak mungkin disesuaikan kembali untuk kebutuhan Satgas tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan kerja sama dengan pihak Bank Jabar-Banten (BJB) yang bersedia untuk membantu dengan memberikan dukungan dana *Corporate Social Responsibility* – nya untuk kebutuhan operasional Satgas tersebut. Pada akhirnya Satgas tersebut dapat berjalan, sehingga terlaksana gerakan masal pembersihan lingkungan melalui kerja sama yang sangat baik antara aparatur pemerintahan KotaTasikmalaya, personil TNI dan Polri, Tokoh RT / RW, masyarakat Kota Tasikmalaya serta BJB. Ada pun hasilnya sudah dapat dilihat bersama dimana sudah tidak ada lagi sampah berserakan di tempat yang tidak semestinya, sudah tidak ada lagi TPS Ilegal, dan tidak ada lagi sampah di TPS yang menumpuk, membusuk dan mengganggu lingkungan karena terlambat diangkut ke TPA.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, memang terjadi perbedaan keadaan kebersihan lingkungan antara sebelum dan setelah dibentuknya Satgas Tasik Resik. Setelah adanya Satgas tersebut sangat terlihat bahwa sudah tidak ada lagi spot-spot tempat sampah berserakan yang mengganggu lingkungan. Pada bekas-bekas tempat TPS Ilegal terdapat pita plastik pembatas warna kuning-hitam (mirip seperti *police line*) dan spanduk yang bertuliskan dilarang membuang sampah ditempat ini. Bahkan ada yang bertuliskan bahwa lokasi ini diawasi cctv. Masyarakat terlihat kembali patuh untuk membuang sampah di TPS yang sudah ditentukan. Dari keadaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan Satgas Tasik Resik oleh Penjabat Walikota Tasikmalaya yang melibatkan lintas pemangku kepentingan telah secara efektif menyelesaikan persoalan sampah di Kota Tasikmalaya yang selama ini berserakan dan tidak teratur.

(b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah

Merujuk pada pemetaan masalah dimana terdapat banyak kontainer sampah yang rusak, jumlah truk pengangkut sampah yang berkurang akibat kerusakan dan faktor usia, dan keadaan alat berat pendorong sampah di lokasi TPA Ciangir yang rusak; maka kebijakan strategis selanjutnya dari Penjabat Walikota Tasikmalaya untuk

merevitalisasi kemampuan kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya adalah dengan melakukan penambahan container sampah, menambah unit truk pengangkut sampah, dan melakukan perbaikan dan penambahan alat berat untuk penanganan sampah di TPA Ciangir.

Pada APBD Kota Tasikmalaya tahun 2023 sudah dianggarkan alokasi untuk pembelian truk pengangkut sampah, container dan perbaikan alat berat. Namun oleh karena alokasi APBD yang terbatas maka Pihak BJB juga memberikan alokasi CSR-nya untuk mendukung pembelian kontainer sampah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang kebersihan lingkungan di Kota Tasikmalaya yang sedang dipimpin oleh Penjabat Walikota.

Strategi Pengurangan Volume Sampah yang dibuang ke TPS

Menurut Penjabat Walikota Tasikmalaya, diperlukan usaha sistematis yang berusaha untuk mengurangi kecepatan pertumbuhan volume sampah yang harus dikirimkan ke TPA. Berdasarkan data diketahui bahwa dari 350 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh penduduk Kota Tasikmalaya, 60 % nya adalah sampah rumah tangga yang tergolong sampah organik.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku-pelaku usaha daur ulang dan diskusi dengan pelaku

usaha budi daya maggot, pada akhirnya Penjabat Walikota Tasikmalaya memutuskan untuk menumbuhkembangkan lagi Usaha Bank Sampah yang selama ini telah ada di masyarakat setempat dan menggiatkan budi daya ulat maggot berbasis masyarakat.

(a) Pengembangan Budi Daya Ulat Maggot berbasis Rumah Tangga dan Komunitas

Budi daya maggot sebagai media penghancur sampah yang berasal dari rumah tangga telah banyak diterapkan di berbagai daerah. Namun implementasinya belum terlalu populer dan menggembirakan. Sehubungan dengan itu, pada masa kepemimpinannya ini, Penjabat Walikota Tasikmalaya mengambil kebijakan untuk memfasilitasi masyarakat Kota Tasikmalaya melaksanakan peternakan maggot pada skala rumah tangga dan kelompok masyarakat. Untuk menampung hasil ternak maggot dari masyarakat, Penjabat Walikota Tasikmalaya menjalin kerja sama dengan pihak Forkominda, khususnya pihak Koperasi Kodim Tasikmalaya sebagai pemangku kepentingan yang akan membeli produksi maggot masyarakat yang kembali didukung modal dari CSR BJB. Proses pengambilan / penerimaan hasil ulat maggot dari masyarakat

dilakukan oleh personil yang ditugaskan dari Koperasi Kodim dengan mekanisme transaksi non tunai menggunakan QR Code. Berdasarkan transaksi dengan QR Code tersebut, masyarakat menerima pembayaran melalui transfer oleh BJB ke rekening masing-masing penjual. Untuk selanjutnya, pihak koperasi Kodim akan menjual hasil maggot tersebut kepada *buyer*.

Dalam mekanisme ini jelas sekali bagaimana ‘keterputusan rantai’ pembelian hasil budi daya maggot dari masyarakat mendapat dukungan dari lintas pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah pihak Kodim Tasikmalaya, dan BJB.

Menurut Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, budi daya maggot ini sangat menjanjikan untuk ditekuni oleh warga masyarakat di Kota Tasikmalaya karena selain dapat mengurangi beban volume sampah yang harus dibuang oleh masing-masing rumah tangga, hasil dari produksi maggot-nya pun cukup menjanjikan untuk sebagai sumber penghasilan tambahan rumah tangga tersebut. Artinya, dalam konteks ini kita melakukan konversi yang sangat strategis pada tataran rumah tangga dan lingkungan rumah tinggal tentang bagaimana mengubah sampah organik rumah tangga yang

selama ini merupakan beban lingkungan yang membutuhkan energy untuk membuangnya, sekarang justru menjadi sumber daya untuk menjadi tambahan penghasilan. Hal ini bisa disebut dengan istilah : ‘*Converting waste to be wealth*’. Demikian dijelaskan oleh Bapak Mj salah satu ASN yang sangat berpengalaman bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.

(b) Pengembangan Bank Sampah Berbasis Masyarakat

Berkaitan dengan penanganan sampah non organik melalui Bank Sampah ini, Penjabat Walikota Tasikmalaya mengaku tidak terlalu kesulitan lagi karena pelakunya sudah banyak di Kota Tasikmalaya, sehingga pemerintah daerah hanya berusaha mendorong saja agar lebih berkembang dan makin banyak volume sampah non organik yang dapat di ambil dari total volume sampah di Kota Tasikmalaya untuk kemudian di daur ulang dan mendatangkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Saat ini diperkirakan setidaknya 20 % dari sampah non organik yang dihasilkan oleh penduduk Kota Tasikmalaya telah diambil oleh Bank Sampah untuk dijual yang menghasilkan pendapatan bagi pelakunya

sebagai bahan daur ulang menjadi barang-barang yang kembali memiliki nilai ekonomi.

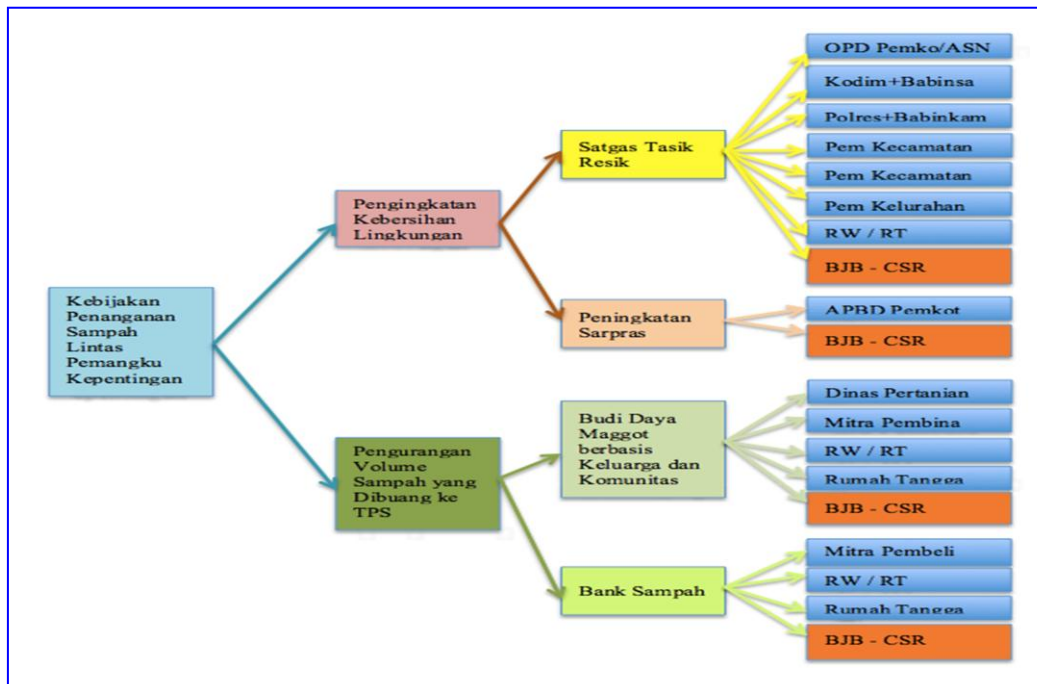
Apabila dicermati temuan lapangan sebagaimana diuraikan pada sub bagian (2) diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan (a) dan (b) sebagai strategi untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut oleh armada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dari TPS ke TPA. Dalam perhitungan matematis sederhana dapat dikalkulasikan bahwa apabila 60% dari sampah organik + 20 % dari sampah non organik di Kota Tasikmalaya telah dapat dioleh menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi bagi masyarakat; maka sesungguhnya terdapat sebanyak $80\% \times 350$ ton sampah per hari yang tidak lagi harus diangkut oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dari TPS-TPS ke TPA Ciangir. Hal ini berarti beban sampah yang harus ditampung oleh TPA Ciangir akan menurun jauh dari sebelumnya 350 ton menjadi hanya 70 ton saja per hari. Sementara 280 ton sampah telah dikonversi menjadi tambahan penghasilan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Model Kebijakan dan Novelty Model Kebijakan

Merujuk pada keempat kebijakan dari pejabat Walikota Tasikmalaya sebagaimana diuraikan pada bagian B. diatas, (Kebijakan Satgas Tasik Resik, Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah, Kebijakan Pengembangan Budi Daya Ulat Maggot Berbasis Masyarakat dan Komunitas, dan Pengembangan Bank Sampah, pada dasarnya dapat

dilustrasikan sebagaimana bagan berikut ini :

Gambar :
Model Kebijakan Pejabat Walikota Tasikmalaya dalam Penanganan Persoalan Sampah



Sumber : Data Primer

Berdasarkan bagan diatas dapat terilustrasikan pemahaman bahwa Kebijakan Penanganan Sampah yang dilaksanakan oleh Pejabat Walikota Tasikmalaya, Bapak Dr. Cheka Virgowansyah,

SSTP, ME pada pokoknya terdiri dari dua strategi penting, yaitu Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan, dan Strategi Pengurangan Volume Sampah yang Dibuang ke TPS. Pada Strategi

Peningkatan Kebersihan Lingkungan, dilaksanakan dua kebijakan yaitu : Kebijakan Tasik Resik dan Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah. Pada Strategi Pengurangan Volume Sampah yang Dibuang ke TPS, diimplementasikan dalam 2 (dua) kebijakan, yaitu : Kebijakan Budi Daya Maggot Berbasis Keluarga dan Komunitas, dan Kebijakan Bank Sampah.

Dengan demikian, keempat kebijakan dari pejabat Walikota Tasikmalaya ini (Satgas Tasik Resik, Peningkatan Sarana dan prasarana Pengangkutan Sampah, Pengembangan Budi Daya Maggot Berbasis Masyarakat dan Komunitas, dan Pengembangan Bank Sampah) secara substansial adalah bentuk-bentuk upaya untuk mengubah sampah yang selama ini menjadi 'beban' dan 'biaya' bagi masyarakat dan pemerintah menjadi 'kesempatan' untuk mendapatkan tambahan penghasilan rumah tangga bagi masyarakat, melalui hasil panen maggot dan hasil penjualan sampah non organik untuk di daur ulang.

Novelty Kebijakan

Keempat kebijakan yang telah digunakan oleh pejabat Walikota tersebut memang bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun pemadu-padanan keempat kebijakan yang terintegrasi dengan intervensi CSR dari BJB menjadi terbukti efektif dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan.

Masyarakat merasakan manfaat langsung dari intervensi CSR tersebut dengan terwujudnya lingkungan yang bersih.

Selain itu, model *problem solving* yang diterapkan oleh Pejabat Walikota tersebut berhasil membentuk suasana kebersamaan berbagai pemangku kepentingan dan elemen-elemen institusi dilingkungan pemerintahan daerah untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Tasikmalaya secara bersama-sama.

Novelty lainnya yang dapat diidentifikasi dari model kebijakan tersebut menjadi desain kebijakannya yang dapat mengoptimalkan sasaran penggunaan CSR untuk mengisi 'ruang-ruang kosong' yang tidak terisi oleh alokasi APBD.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan pada Bab sebelumnya, maka pada akhir penelitian ini dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Model penanganan sampah lintas pemangku kepentingan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya mencakup 2 (dua) strategi yang saling terintegrasi, yaitu : (1) Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan, dan (2) Strategi Pengurangan Volume Sampah yang Dibuang ke TPS.
2. Kedua strategi tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat)

kebijakan yang merupakan penjabaran dari masing-masing strategi. Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan dijabarkan dalam 2 (dua) kebijakan, yaitu : (a) Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Tasik Resik, dan (b) Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah. Sementara Strategi Pengurangan Volume Sampah yang Dibuang ke TPS juga dijabarkan dalam 2 (dua) kebijakan, yaitu : (a) Kebijakan Pengembangan Budi Daya Magoot berbasis Rumah Tangga dan Komunitas, dan (b) Kebijakan Pengembangan Bank Sampah Berbasis Masyarakat.

3. Dari keempat kebijakan tersebut, penelitian ini menemukan faktor kunci yang menjadi *Novelty* dari model ini adalah : (1) pelibatan lintas pemangku kepentingan dalam operasionalisasi keempat kebijakan dalam penanganan sampah. dan (2) Intervensi CSR dari Korporasi yang terintegrasi dengan keempat kebijakan yang diterapkan.
4. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat yaitu : ASN Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui OPD masing-masing, Unsur TNI dari Kodim setempat, Unsur Kepolisian dari Polres setempat, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Pemerintah Kelurahan, Unsur Tokoh

Masyarakat termasuk RW / RT dan Komunitas Masyarakat. Unsur Korporasi yang juga menjadi pemangku kepentingan yang berperan penting adalah Bank Jabar – Banten melalui dukungan dana CSR-nya.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan penelitian ini antara lain :

1. Agar kebijakan yang sudah diinisiasi oleh Penjabat Walikota Tasikmalaya, Bapak Cheka Virgowansyah dapat dilanjutkan oleh pimpinan pemerintahan dan seluruh masyarakat di Kota Tasikmalaya dan menjadikannya sebagai salah satu budaya Kota Tasikmalaya
2. Agar Bank Jabar-Banten tetap terus berkomitmen mendukung kebijakan-kebijakan yang baik dari Pemerintah Kota Tasikmalaya demi kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku :

- BPS Kota Tasikmalaya; 2023, Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya.
- Emerson, Kirk & Nabatchi, Tina. 2015. Collaborative Governance Regime. Washington DC : Georgetown University Press.

- Hikmat, Hari; 2013, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Huraera, Abu.; 2011, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Munandar, Aries.; 2015, Kajian Manajemen Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (*Kasus : Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Di Kota Bengkulu*), Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Panji; 2013, Panduan Membuat Kompos Cair, Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Terry, George R.;1977, Principles of Management, Richard D Irwin Inc, Illinois
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah
- Jurnal Ilmiah :**
- Andina, Elga; 2019, Analisis Perilaku Pemilahan Sampah di Kota Surabaya, Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 10 No. 2, Desember 2019, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686207&val=18337&title=Analisis%20Perilaku%20Pemilahan%20Sampah%20di%20Kota%20Surabaya>, , diakses 27 Januari 2023
- Asteria, Donna; Heru Heruman, 2017, Bank Sampah sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya, Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 23 No. 1 (2016), <https://journal.ugm.ac.id/jml/article/view/18783>, diakses 20 Januari 2023
- Fliervoet, J.M., Geerling, G.W., Mostert, E. *et al.* Analyzing Collaborative Governance Through Social Network Analysis: A Case Study of River Management Along the Waal River in The Netherlands. *Environmental Management* 57, 355–367 (2016). <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0606-x>
- Ismaniar; 2020, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah, <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjce/article/view/569>, , diakses 1 Februari 2023
- Kahfi, Ashabul; 2017, Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah, Jurnal Jurisprudentie, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3661>, diakses 10 Januari 2023
- Mardiani, Rai; I Gusti Ayu and Purna, S.Pd, M.Si, I Nyoman and Posmaningsih, S,KM.,M.Kes, Dewa Ayu Agustini (2020) *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Ibu Pkk Dalam Pengelolaan Sampah Di Dusun Mengwitani Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*. Diploma Thesis, Poltekkes Kemenkes Denpasar. <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/4178/>, diakses 10 Januari 2023
- Nurla, Ai.; 2020, Kebijakan Pemerintah Kota Tasikalaya dalam Pengelolaan Sampah, 2021 oleh Ai Nurla, <http://digilib.uinsgd.ac.id/45426/>, diakses 9 Januari 2023
- Richa,Irsyah. Kebakaran dan Alih Fungsi Lahan Jadi Pemicu Banjir Bandang di Kota Batu. *Jatim times* 9 November 2021. <https://jatimtimes.com/baca/253688/20211109/162800/> kebakaran-dan-alih-fungsi-lahan-jadi-pemicu-banjir-bandang-di-kota-batu, diakses 8 Januari 2023

- Riswan, R., Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto; 2011, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085/1834>, diakses 1 Februari 2023
- Saputro, Yusa Eko; Kismartini, Syarifudin; 2015, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat melalui Bank Sampah, Indonesia Journal Of Conversation Volume 04 Nomor 1 Tahun 2015, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/5162>, diakses 1 Februari 2023
- Suryani, Anih Sri; 2022, Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang), <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447>, diakses 25 Januari 2023
- Usman, Said; 2016, Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 3 November 2016, https://www.researchgate.net/profile/Said-Usman-2/publication/327396224_Strategi_Pengelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_Di_Kota_Tarakan_Kalimantan_Utara/links/5b8d21d74585151fd1452cec/Strategi-Pengelolaan-Sampah-Rumah-Tangga-Di-Kota-Tarakan-Kalimantan-Utara.pdf, diakses 1 Februari 2023
- Yasmin, Azmi; 2021, Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, S.L.R Vol. 3 No.1 Hal. :102-114 <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/123/108>, diakses 1 Februari 2023